

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO, UPAH MINIMUM DAN INVESTASI
TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
PADA 38 KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010-2014**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Daru Mahendras Wara
115020107111052**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH MINIMUM DAN INVESTASI TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PADA 38 KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014

Yang disusun oleh :

Nama : Daru Mahendras Wara
NIM : 115020107111052
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 01 Juni 2016

Malang, 9 Juni 2016

Dosen Pembimbing,



Dr. Iswan Noor, SE., M.E.

NIP 19590710 198303 1 004

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH MINIMUM
DAN INVESTASI TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
PADA 38 KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010-2014**

Daru Mahendras Wara¹, Dr. Iswan Noor, SE., M.E.¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: mahendrasdaru18@gmail.com

ABSTRAK

Kependudukan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, jumlah penduduk menentukan efisiensi perekonomian dan kualitas dari tenaga kerja itu sendiri, karena akan menjadi sebuah kontribusi ataupun menjadi kendala dalam sebuah pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu besar tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan. Pertumbuhan penduduk dengan optimalisasi tenaga kerja didalamnya menjadi suatu yang sangat di cita-citakan oleh setiap negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, upah minimum dan investasi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2014.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (Fixed Effect Model) dan kaitkan dengan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, sedangkan upah minimum berpengaruh signifikan dan negative terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

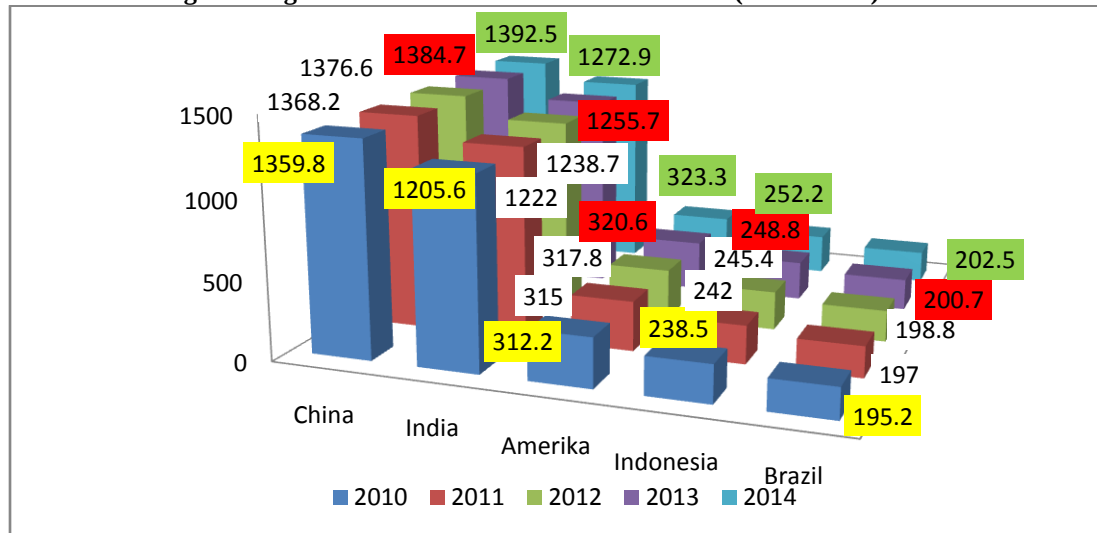
Kata kunci: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, PDRB, Upah Minimum, Investasi

A. PENDAHULUAN

Kependudukan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, jumlah penduduk menentukan efisiensi perekonomian dan kualitas dari tenaga kerja itu sendiri, karena akan menjadi sebuah kontribusi ataupun menjadi kendala dalam sebuah pertumbuhan ekonomi. Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus berpendapat akan ada perlombaan antara tingkat perkembangan *output* dengan tingkat perkembangan penduduk, yang akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Penduduk akan berproduktifitas sebagai tenaga kerja akan mengalami kesulitan dengan banyak kompetitor dan sedikitnya lapangan kerja, tetapi ada pula penduduk yang menganggur yang akan menekan standar hidup bangsanya menjadi semakin rendah. Imbasnya penduduk yang selalu berkembang menuntut perkembangan ekonomi yang terus-menerus. Semua memerlukan lebih banyak investasi, dan investasi berasal dari tabungan yang disisihkan untuk kepentingan modal berproduktifitas. Bagi negara berkembang sangat sulit memiliki kapital karena unsur SDM semakin banyak dan tidak ada sumber produktivitas yang dilaksanakan sehingga tidak ada pendapatan, sumber tabungan pun tidak ada (Irawan dan Suparmoko, 2012).

Kesejahteraan masyarakat tercipta karena terdapat daya beli masing-masing individu, oleh karena itu individu harus melakukan produktivitasnya untuk mencapai pendapatan yang diinginkan. Problematika yang terjadi pada saat ini minimnya akses dalam pemanfaatan sumber daya demografi dalam input produksi menghilangkan intensitas produktivitasnya, sehingga tidak ada timbal balik, jumlah produksi barang dan jasa yang langka serta naiknya harga lalu ditambah dengan daya beli masyarakat karena tidak ada produktivitas yang dihasilkan. Maka dengan demikian kita dapat lihat perkembangan jumlah penduduk terbesar dunia yang di dominasi negara berkembang antara lain.

Gambar 1 : 5 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar Dunia (dalam Juta) Tahun 2010-2014

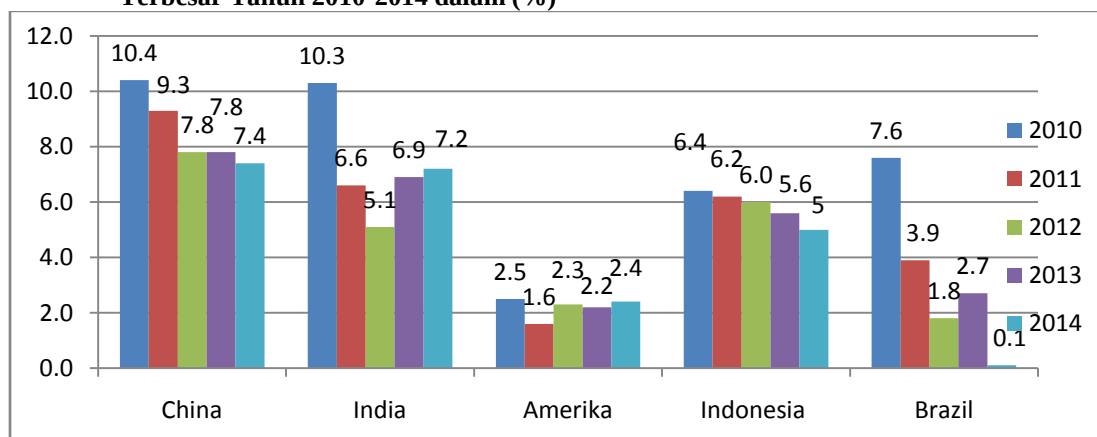


Sumber : BPS RI, 2016 (Data diolah)

Perlu kita ketahui bahwa jumlah penduduk di berbagai negara mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahun dengan jumlah penduduk terbesar diperoleh China pada tahun 2014 sebesar 1.392,5 juta populasi, dan kedua India dengan 1.272,9 juta populasi. Tingkat perkembangan penduduk yang tinggi, maka semakin banyak jumlah penduduk usia kerja produktif antara 15-65 tahun dan akan merendahkan angka ketergantungan penduduk non produktif. Hal ini semakin menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk pada usia produktif lebih besar daripada kelompok umur usia non produktif maka disebutkan bahwa negara tersebut mengalami bonus demografi.

Kondisi demografi yang begitu pesat perkembangannya, maka otomatis akan menimbulkan dampak sosial ekonomi, bila kondisi tersebut dimanfaatkan dengan baik maka produktivitas bukan tidak mungkin akan menjadi tren positif bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2006) Penyerapan tenaga kerja menjadi suatu hal yang teramat penting dalam peningkatan ekonomi secara agregat seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh pada jumlah produksi barang dan jasa meningkat yang berpengaruh pada aktifnya perdagangan. Pada teori Adam Smith mepercayai bahwa, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai pada titik maksimum dengan melibatkan 2 unsur melalui pertambahan penduduk, serta pertumbuhan *output* total. Kolaborasi dengan pertambahan penduduk ini yang melahirkan karya produktif yang berpedoman pada peningkatan *output*nya akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi harus di kolaborasikan dengan penggunaan tenaga kerja maksimum. Dengan melihat kenyataannya tingkat PDRB maka diperoleh data antara lain.

Gambar 2 : Tingkat Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Berbagai Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar Tahun 2010-2014 dalam (%)

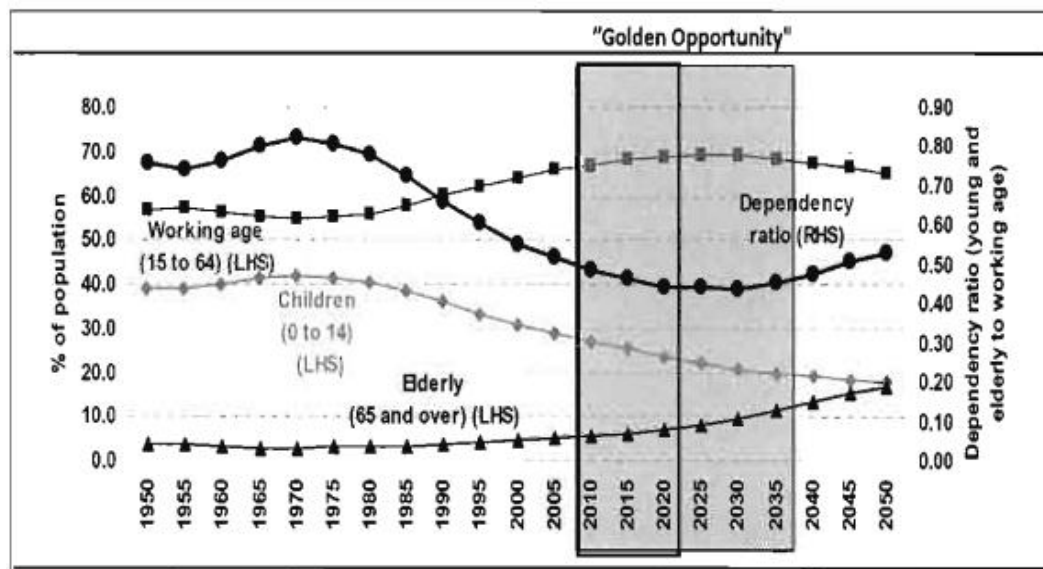


Sumber : BPS RI (2016), hasil dari *International Monetary Fund*, (data diolah)

Pada gambar 2 dapat kita lihat bahwa Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan secara agregat mengalami penurunan. Terutama di Indonesia secara bertahap mengalami penurunan tingkat PDRB dari tahun 2010 sebesar 6,4 % sampai dengan tahun 2014 hingga 5 % dan didukung dengan negara lain seperti Cina 10.4% merosot menjadi 7,4 %. Hal ini menandakan bahwa peningkatan penduduk akan mengalami guncangan ekonomi ketika semua menuntut produktivitas akan tetapi sumber daya modal tidak mencukupi untuk membuka unit produksi. sumber-sumber pendapatan hanya akan mencukupi semua kebutuhan yang terlampaui tinggi karena semakin banyak permintaan dibandingkan penawaran dalam persediaan, Hal ini tentu menguras tabungan untuk jangka panjang. Maka dapat disikapi dengan respon yang cepat bagi pemangku kebijakan, dengan mendorong percepatan pemanfaatan sumber demografi didalamnya.

Dengan kata lain menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai, seiring tingkat produksi yang semakin meningkat. Dalam pandangan didasarkan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan, apabila produsen menciptakan barang dan jasa yang baru dan beraneka ragam serta menaikkan kuantitas produksinya maka terciptalah sebuah pasar sehingga di dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang tersebut, dengan kata lain penawaran yang bertambah akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan. Dengan kesempatan ini maka, melihat Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan mengenai bonus demografi Indonesia pada gambar berikut.

Gambar 3 : Prediksi Bonus Demografi Indonesia



Sumber : Renstra Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, 2015

Hal ini tentu berpengaruh positif pada jumlah tenaga kerja yang terus meningkat pada waktu ke waktu karena tingkat usia produktif yang terus berkembang, serta jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masyarakat yang bergantung pada penyerapan tenaga kerja. Pada Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan bayangan dan prediksi tentang perkembangan penduduk sampai dengan 2050 yang perlu disiapkan langkah guna memanfaatkan kesempatan emas dengan bonus demografi. Melihat gambar tersebut dapat kita lihat bahwa pada puncak usia produktif dimulai merangkak naik pada tahun 2010, sebesar 60% jumlah penduduk di usia produktif dari jumlah seluruh penduduk Indonesia dan diperkirakan akan terus berkembang, serta mengalami puncaknya pada tahun 2020 sampai dengan 2030 sebesar 70% penduduk usia produktif dari 30% angka usia ketergantungan hal ini yang dinamakan bonus demografi serta akan dimanfaatkan dan dipersiapkan menjadi kesempatan emas melalui program ketenagakerjaan dan kependudukan. Oleh karena itu pada penelitian ini yang menjadi sorotan penulis mengenai proses dari implikasi masalah kependudukan dan lapangan kerja menjadi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

B. KAJIAN PUSTAKA

Hakikat Sumberdaya Manusia

mengenai konteks hakikat Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan pembangunan menurut Hasibuan (1996), yang pertama adalah peran utama manusia ketimbang unsur-unsur nonmanusia dalam seluruh proses pembangunan. Hal-hal yang termasuk dalam unsur nonmanusia ini adalah alam dan lingkungan (berikut hutan, flora, fauna, jin, malaikat, dan lain-lain). Peran utama ini tergambar dengan jelas pada ketiga fungsi manusia utama yaitu sebagai penguasa pembangunan, sebagai pelaksana utama pembangunan, dan sebagai penerima hasil-hasil pembangunan yang mengisyaratkan bahwa faktor utama dalam seluruh kegiatan pembangunan. Manusia bertindak selaku pemimpin dalam seluruh proses pembangunan.

Konsep Ketenagakerjaan

Menurut pendapat Djojohadikusumo (1989) didalam Wicaksono (2014), mengenai arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Dengan kata lain dalam pengertian yang lebih praktis menurut Irawan dan Suparmoko (2012) Tenaga Kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 sampai 64 tahun yang dapat dikategorikan penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja Serta menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1, Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Mulyadi (2003), mengenai pengertian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah : “situasi yang menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut”. Adapun dalam Badan Pusat Statistik (2016) tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki arti bahwa: “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk yang berumur 15 tahun keatas”. TPAK memberi gambaran penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Dalam perhitungannya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat di tentukan melalui :

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas}} \times 100\%$$

Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Dalam permintaan tenaga kerja menurut Bellante dan Jackson (1990), menjelaskan bahwa hubungan tingkat upah menunjuk pada biaya jasa harga tenaga kerja dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Adapun kurva permintaan menggambarkan jumlah maksimum tenaga kerja yang seorang pengusaha bersedia untuk memperkerjakannya pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.

Adapun dengan penawaran tenaga kerja menurut Bellante dan Jackson (1990), suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang para pemilik tenaga kerja siap untuk menyediakannya. Secara khusus kurva penawaran melukiskan jumlah maksimum yang siap disediakan pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Lebih jelas pada tingkat upah minimum yang dengan tingkat upah itu para pemilik tenaga kerja siap untuk menyediakan jumlah yang khusus itu.

Produk Domestik Regional Bruto

Dalam menjalankan dan menganalisa suatu pertumbuhan ekonomi, yang diketahui melalui jumlah kenaikan *output* dalam jangka panjang, Maka dijelaskan dalam Rahardja dan Manurung (2008) Produk Domestik Bruto menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Semua faktor produksi yang berlokasi dalam perekonomian tersebut *outputnya* diperhitungkan dalam PDB. Akibatnya, PDB kurang memberikan gambaran tentang berapa sebenarnya *output* yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian produksi.

Terdapat dua cara dalam penghitungan PDRB, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan mengikuti harga tiap tahunnya dan menunjukkan pendapatan yang mungkin dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah. Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan merupakan PDRB yang dinilai atas dasar harga tetap suatu

tahun tertentu dan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun (Wicaksono, 2014)

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Adam Smith mengemukakan bahwa Kebijakan *Laizes Faire* atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Dalam penjelasan perkembangan penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian, yang akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Pengembangan spesialisasi dan pembagian kerja diantara tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Adam Smith mengatakan apabila pembangunan sudah berlangsung, maka proses pembangunan akan terus menerus berlangsung secara kumulatif (Adisasmita, 2013).

Upah Minimum

Didalam peraturan pemerintah no.8 tahun 1981 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik buruh itu sendiri maupun keluarganya (Husni, 2013).

Teori Upah Efisiensi

Teori upah efisiensi (*efficiency-wage*) menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, pengurangan upah juga akan terjadi jika teori ini benar bila memperendah produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Hal yang mendasar pada upah mempengaruhi produktivitas pekerja ini, lebih dikaitkan upah mempengaruhi nutrisi. Para pekerja dibayar dengan upah memadai bisa membeli lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif (Mankiw, 2003)

Investasi

Menurut Sukirno (2006), investasi sebagai pengeluaran atau penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Sumber dalam objek investasi menurut Mankiw (2003), barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan yang memiliki nilai yang lebih besar. Investasi memiliki 3 subkelompok: investasi tetap bisnis, investasi tetap residensial, dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis adalah pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan. Investasi residensi adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah. Investasi persediaan adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan (jika persediaan menurun, investasi persediaan negatif).

Teori Fungsi Investasi

Dalam teori makro Keynes, keputusan suatu investasi akan dilaksanakan atau tidak, jelas merugikan atau menguntungkan tergantung kepada perbandingan keuntungan yang diharapkan (yang dinyatakan dalam persentase per satuan waktu) di satu pihak dan biaya penggunaan dana atau tingkat bunga dilain pihak. Dan dalam teori Keynes, tingkat keuntungan yang diharapkan ini dengan istilah *Marginal Efficiency of Capital* (Boediono, 1982)

Menurut Boediono (1982), tingkat MEC atau fungsi investasi merupakan patokan bagi pengelola modal untuk dapat menyajikan hubungan antara tingkat bunga yang berlaku dengan tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan oleh para investor.

C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kuantitatif deskriptif yaitu penelitian ini memberikan kepada sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan memberikan perhatian kondisi dan gejala di lingkungan dengan dibuktikan dengan data-data yang bersifat angka. Serta narasi deskriptif juga berupa sejumlah laporan penelitian, seperti diketahui dan diambil dari publikasi statistik pemerintah seperti Biro Pusat Statistik ketenagakerjaan, sensus, dan sebagainya, dimana data disisihkan untuk presentasi pada waktu yang tepat (Sekaran, 2007).

Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dan tujuan dari penelitian, maka ditentukan tempat penelitian pada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Jl. Raya kendangsari industri No. 43-44 surabaya (031) 8438873.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Tentang jenis sumber data yang digunakan, penulis menggunakan sumber data sekunder dalam mengolah beberapa informasi tentang variabel penelitian ini. Menurut Sekaran (2006), data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir. Data tersebut bisa merupakan internal atau eksternal organisasi dan diakses melalui internet, penelusuran dokumen, atau publikasi informasi.

Definisi Operasional

Pada penelitian kuantitatif diperlukan uraian mengenai definisi atau definisi operasional dan pengukuran atas semua variabel penelitian. Berikut merupakan definisi operasional sekaligus pengukuran masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Y) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk yang berumur 15 tahun keatas (BPS RI, 2016).
2. Produk Domestik Regional Bruto (X1) Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. (BPS RI, 2016)
3. Upah minimum regional (X2) merupakan upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. pada umumnya yang berlaku secara regional. (Husni, 2003)
4. Investasi (X3) sebagai pengeluaran atau penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. (Sukirno, 2006)

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode data panel. Analisis data panel merupakan kombinasi dari deret waktu (time-series) dan kerat lintang (crosssection). Dalam regresi data panel ada tiga macam pendekatan yaitu pendekatan Common Effect Method (CEM), pendekatan Fixed Effect Method (FEM) dan pendekatan Random Effect Method (REM). Untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan adalah dengan menggunakan uji Chow dan Uji Hausman, kemudian uji asumsi klasik sebagai analisis uji data. Selanjutnya didapatkan model sebagai berikut:

$$(TPAK_{it}) = \alpha + \beta_1(PDRB_{it}) + \beta_2(UMR_{it}) + \beta_3(inv_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Dengan penjelasan :

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

PDRB = Jumlah PDRB Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan

UMR = Upah Minimum Regional

inv = total investasi sektor Pemerintah dan Swasta.

A = Konstanta

I = Kabupaten/Kota ke-i (1,2, ..., 38)

t = Tahun Pengamatan (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)

ε_{it} = Kesalahan Pengganggu (*term of error*)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Pada uji ini diharapkan tidak terjadi multikolinearitas dimana antara variabel independen dan model regresi tidak berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna yang dapat diketahui dengan cara melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada masing – masing variabel bebas. Hipotesis yang digunakan pada asumsi ini yaitu :

H_0 : tidak terdapat multikolinearitas pada variabel bebas

H_1 : terdapat multikolinearitas pada variabel bebas

Apabila nilai $VIF > 10$ maka H_0 ditolak yang menunjukkan adanya multikolinieritas dan sebaliknya apabila sebaliknya $VIF < 10$ maka H_0 diterima yang menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas. Berikut adalah hasil pengujian asumsi non multikolinearitas.

Tabel 1 : Tabel Nilai Korelasi

Variabel	Investasi	PDRB	UMR
Investasi	1	0.2776	0.3695
PDRB	0.2776	1	0.5132
UMR	0.3695	0.5132	1

Sumber : Olah Data Eviews 6, 2016

Berdasarkan tabel hasil dari uji diatas didapatkan bahwa seluruh variabel bebas mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.

b. Uji Heterokedastisitas

Pengertian dari asumsi ini adalah bahwa ragam (*variance*) dari residual model adalah homogen. Pengujian heterokedastisitas menggunakan uji *Glejser* yaitu dengan meregresikan nilai residual yang dimutlakan dengan variabel bebas. Nilai signifikansi yang lebih besar dari alpha 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hipotesis statistik pengujian heteroskedastisitas:

H_0 : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

H_1 : terdapat masalah heteroskedastisitas

Berikut adalaah hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser*:

Tabel 2 : Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji *Glejser*

Variabel Y	Variabel bebas	Sig Uji t	Keterangan
Abs_residual	PRDB	0,676	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	INVESTASI	0,405	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	UMR	0,865	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Olah Data Eviews 6, 2016

Penentuan Model Estimasi

Adapun beberapa metode yang digunakan adalah *Redundant Fixed Effect Test (Uji Chow)*, *Correlated Random Effects – Hausman Test* dan *Lagrange Mutlipier Test*. Ketiga pengujian tersebut digunakan untuk membandingkan pendekatan mana antara *Common Effect*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* yang paling cocok. Kaidah pengambilan keputusan dalam ketiga pengujian tersebut adalah dengan menggunakan nilai signifikansi, di mana jika nilai signifikansi lebih besar dari alpha 5% maka hipotesis H_0 yang diterima, dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 5%, maka hipotesis H_1 yang diterima. Berikut adalah uraian hasil pemilihan model regresi panel.

Tabel 3 : Tabel Hasil Pemilihan Model Regresi Panel

Uji	Hipotesis	Nilai Sig	Kesimpulan
<i>Redundant Fixed Effect Test (Uji Chow)</i>	H_0 : <i>Common Effect Model</i>	0,000	<i>Fixed Effect Model</i>
	H_1 : <i>Fixed Effect Model</i>		
<i>Correlated Random Effects – Hausman Test</i>	H_0 : <i>Random Effect Model</i> H_1 : <i>Fixed Effect Model</i>	0,0006	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber : Olah Data Eviews 6, 2016

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Uji *Chow* diperoleh nilai sig =0,000. Nilai tersebut $< 0,05$ sehingga sesuai kaidah yang telah ditentukan, diputuskan Tolak H_0 . Artinya bahwa *Model Fixed Effect* lebih baik dari *Common Effect Model*. Selanjutnya untuk mengetahui mana antara model *Fixed Effect Model* dan *Random Effect*

Model yang lebih baik, digunakan uji *Hausman*. Dari hasil yang telah diperoleh, nilai sig menunjukkan $< 0,05$ sehingga diputuskan Tolak H_0 yang artinya bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik dari *Random Effect Model*.

Hasil Regresi Data Panel

Tabel 4 : Hasil Regresi Data Panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM)

Variabel Independen	B	t_{hitung}	Signifikan	Keterangan
Konstanta	1,857008			
PDRB (X_1)	$2,51 \times 10^{-12}$	1.821	0.0707	Signifikan
UMR (X_2)	$-6,9 \times 10^{-8}$	-2.119	0.0358	Signifikan
Investasi (X_3)	$-5,96 \times 10^{-13}$	-0.621	0.5357	Tidak Signifikan
R-squared	0.996932			
Prob (F-statistic)	0.000000			

Sumber : Olah Data *Eviews* 6, 2016

a. Uji F

Kriteria pengujian yang digunakan adalah Tolak H_0 jika nilai nilai sig $< 0,05$ dan sebaliknya adalah Terima H_0 jika nilai nilai sig $> 0,05$. Berdasarkan hasil output regresi panel, diperoleh nilai sig $F = 0.0000$ yang lebih kecil dari $0,05$. Oleh karena itu diputuskan Tolak H_0 yang artinya PDRB, UMR dan Investasi berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara bersama-sama.

b. Uji R^2

maka untuk mengetahui proporsi atau presentase kekuatan pengaruh variabel PDRB (X_1), INVESTASI (X_2) dan UMR (X_3) terhadap TPAK (Y) dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan tabel hasil analisis regresi diperoleh nilai R^2 sebesar $0,996$. Hasil tersebut menjelaskan sumbangan atau kontribusi dari variabel-variabel bebas dalam mempengaruhi variabel Y adalah sebesar $99,6\%$, sedangkan $0,4\%$ lainnya disumbangkan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan ini.

c. Uji t

Hasil uji t menjelaskan bahwa 2 variabel bebas (*independent variable*) yaitu PDRB, UMR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Sedangkan satu variabel bebas yaitu investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisa regresi di atas, maka dapat dirumuskan suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$TPAK_{it} = 1,857008 + 2,51 \times 10^{-12} \text{ PDRB} + (-) 6,95 \times 10^{-8} \text{ UMR} + (-) 5,96 \times 10^{-13} \text{ investasi}$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas, maka dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Konstanta sebesar $1,857008$ menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata TPAK 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur sebesar $1,857008\%$.
- 2) Koefisien regresi Jumlah PDRB sebesar $2,51 \times 10^{-12}$ menyatakan bahwa setiap kenaikan jumlah total PDRB 1 Rupiah, maka tingkat partisipasi angkatan kerja berubah sebesar $2,51 \times 10^{-12}$ dengan anggapan variabel jumlah upah minimum dan investasi tetap. Tanda positif pada nilai koefisien regresi melambangkan hubungan yang searah antara jumlah PDRB dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, artinya apabila total PDRB meningkat sebesar 1 Rupiah, maka tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/Kota tersebut mengalami peningkatan sebesar $2,51 \times 10^{-12}$, atau dengan kata lain bertambahnya jumlah PDRB sebesar 10 milyar Rupiah (Rp 10.000.000.000) maka akan menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 2,51 persen.
- 3) Koefisien regresi UMR sebesar $-6,95 \times 10^{-8}$ menyatakan bahwa setiap kenaikan jumlah upah minimum sebesar satu juta rupiah (Rp 1.000.000), maka tingkat partisipasi angkatan kerja berubah sebesar $-6,95$

persen dengan anggapan variabel jumlah upah minimum dan investasi tetap. Tanda negatif pada nilai koefisien regresi melambangkan hubungan yang berlawanan antara tingkat upah minimum dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, atau setiap kenaikan 1 rupiah akan menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tersebut sebesar $-6,95 \times 10^{-8}$.

- 4) Koefisien regresi INVESTASI sebesar -5,96%. Variabel ini tidak mempengaruhi variabel dependen karena nilai probabilitasnya di bawah nilai probabilitas α .

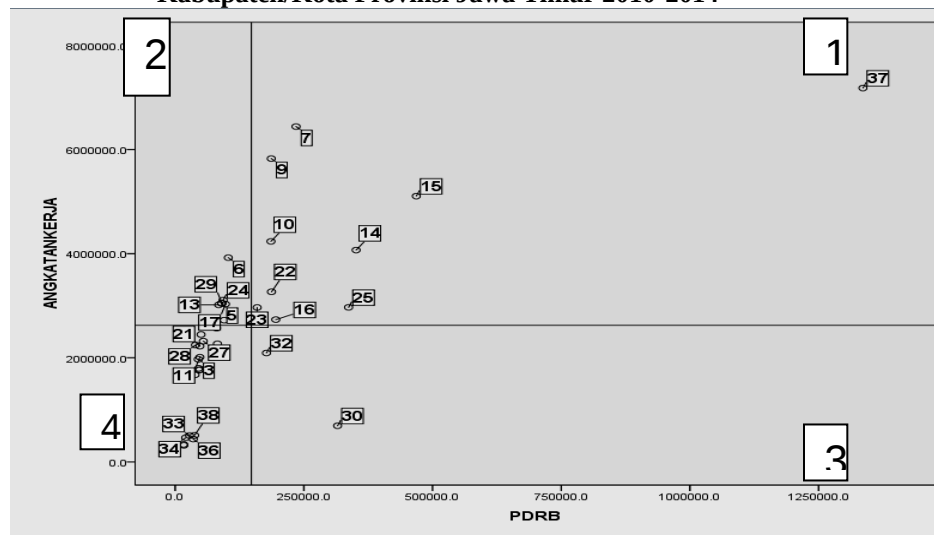
Implikasi Hasil Penelitian

a. Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Hasil dari penelitian ini bahwa jumlah PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini berarti peningkatan pada PDRB akan berpengaruh pada kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja. Sejalan pada keterkaitan partisipasi angkatan kerja menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006) didalam Wicaksono (2014), pertumbuhan penduduk dengan disertai dengan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran domestiknya juga lebih besar. .Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut.

Melihat hal ini maka dapat dijelaskan melalui diagram kartesius mengenai hubungan besar kecilnya TPAK, juga mempengaruhi PDRB yang dihasilkan oleh para tenaga kerja, maka dapat dijelaskan oleh pada gambar berikut.

Gambar 4 : Gambar Diagram Kartesius Pengaruh PDRB Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2014



1	Kab. Pacitan	11	Kab. Bondowoso	21	Kab. Ngawi	31	Kota Blitar
2	Kab Ponorogo	12	Kab. Situbondo	22	Kab. Bojonegoro	32	Kota Malang
3	Kab. Trenggalek	13	Kab. Probolinggo	23	Kab. Tuban	33	Kota Probolinggo
4	Kab. Tulungagung	14	Kab. Pasuruan	24	Kab. Lamongan	34	Kota Pasuruan
5	Kab. Blitar	15	Kab. Sidoarjo	25	Kab. Gresik	35	Kota Mojokerto
6	Kab. Kediri	16	Kab. Mojokerto	26	Kab. Bangkalan	36	Kota Madiun
7	Kab. Malang	17	Kab. Jombang	27	Kab. Sampang	37	Kota Surabaya
8	Kab. Lumajang	18	Kab. Nganjuk	28	Kab. Pamekasan	38	Kota Batu
9	Kab. Jember	19	Kab. Madiun	29	Kab. Sumenep		
10	Kab. Banyuwangi	20	Kab. Magetan	30	Kota Kediri		

Sumber : BPS Jatim, 2010-2014 (data diolah)

Pada gambar 4 merupakan kondisi dimana angkatan kerja memberikan efek positif bagi PDRB, selain itu dengan penambahan angkatan kerja juga Indonesia sebagai negara berkembang dengan keunggulan demografi yang sangat tinggi, tentunya harus memanfaatkan dan memberdayakan sektor masyarakat dengan membuat suatu industri

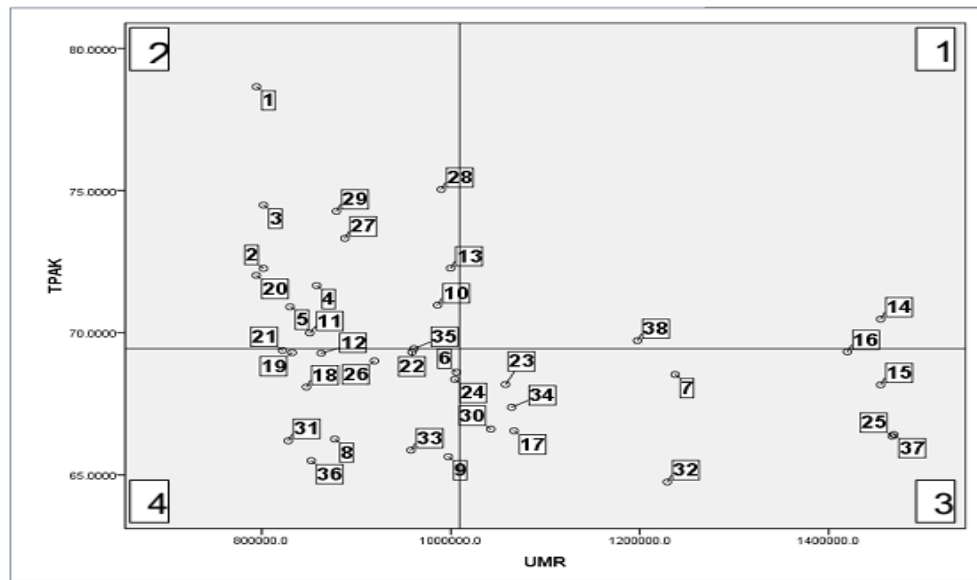
padat karya yang akan jelas semakin banyak produktifitas dan pendapatan yang didapatkan. Daerah yang berada pada kuadran satu merupakan daerah yang pada umumnya memiliki jumlah penduduk tenaga kerja yang banyak bersamaan jumlah angkatan kerja begitu besar dengan output PDRB diatas rata-rata sebesar 148 trilyun dari total tahun 2010 - 2014. Daerah yang memiliki perkembangan angkatan kerja dan PDRB yang signifikan, bila dilihat Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan memiliki tingkat angkatan kerja yang tinggi diatas rata-rata serta PDRB yang diatas rata-rata. Daerah tersebut tentunya akan mengalami permasalahan dalam populasi penduduk yang semakin banyak, dikarenakan akan banyak pendatang yang akan menekan taraf hidup yang semakin rendah dan akan berpengaruh pada kesejahteraan penduduk.

Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tumbuh rata-rata dari tahun 2010-2014 sebesar 5,27% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,43% dan juga didukung oleh sektor unggulan utama pada sektor-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja seperti sektor pertanian. Pada tahun 2011 pada awal peningkatan dari TPAK sebesar 69,35% dengan Laju PDRB sebesar 6.13 dan di lanjutkan tren positif tahun 2012 dengan TPAK sebesar 69.88% lalu laju PDRB 6.29 yang membuktikan laju PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap TPAK.

b. Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dalam analisis regresi bahwa pada variabel upah minimum regional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap TPAK di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. . Berikut deskriptif pada diagram *kartesi* mengenai upah minimum.

Gambar 5 : Gambar Diagram *Kartesi* Pengaruh Upah Minimum Terhadap TPAK di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014



1	Kab. Pacitan	11	Kab. Bondowoso	21	Kab. Ngawi	31	Kota Blitar
2	Kab Ponorogo	12	Kab. Situbondo	22	Kab. Bojonegoro	32	Kota Malang
3	Kab. Trenggalek	13	Kab. Probolinggo	23	Kab. Tuban	33	Kota Probolinggo
4	Kab. Tulungagung	14	Kab. Pasuruan	24	Kab. Lamongan	34	Kota Pasuruan
5	Kab. Blitar	15	Kab. Sidoarjo	25	Kab. Gresik	35	Kota Mojokerto
6	Kab. Kediri	16	Kab. Mojokerto	26	Kab. Bangkalan	36	Kota Madiun
7	Kab. Malang	17	Kab. Jombang	27	Kab. Sampang	37	Kota Surabaya
8	Kab. Lumajang	18	Kab. Nganjuk	28	Kab. Pamekasan	38	Kota Batu
9	Kab. Jember	19	Kab. Madiun	29	Kab. Sumenep		
10	Kab. Banyuwangi	20	Kab. Magetan	30	Kota Kediri		

Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Timur dan BPS Jatim, 2010-2014 (data diolah)

Pada gambar 5 dijelaskan bahwa upah minimum pada daerah yang terletak di kuadran 3, memiliki upah diatas rata-rata sebesar 1 juta Rupiah dengan tingkat partisipasi angkatan kerja dibawah rata-rata sebesar 69%. Hal itu pula terjadi pada Kota/Kabupaten yang mempunyai latar belakang perkembangan *output* produksi yang tinggi dan jumlah

angkatan kerja yang begitu besar pada daerah Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang dan sebagainya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang semakin kecil juga mempunyai 2 pandangan pada penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) merupakan usia produktif dalam bekerja, akan tetapi ada pengaruh negatif oleh tingkat upah terhadap angkatan kerja disebabkan oleh beberapa indikator diantaranya yaitu berkurangnya jumlah angkatan kerja seiring dengan peningkatan upah. Sisi permintaan tenaga kerja bagi perusahaan, pemberian upah yang semakin tinggi dapat lebih mengintensifkan produktivitas perorangan karyawannya, maka tidak diperlukan lagi penambahan karyawan. Akhirnya tidak adanya peningkatan jumlah angkatan kerja pada waktu tersebut seiring berkembangnya kenaikan upah yang signifikan.

Indikator lain yang menjadi penyebab hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat upah menjadi negatif adalah seperti yang dijelaskan pakar teori ekonomi klasik, bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah nilai riil menjadi turun. Upah tersebut akan hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kamandegan (*stationary state*). Pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau *output*. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

c. Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Disebutkan dalam hasil analisis regresi bahwa pada variabel investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2010-2013. Hal ini berbeda dengan hipotesis awal dimana disebutkan bahwa investasi akan berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Hal ini bisa terjadi ketika investasi ada atau tidak adanya investasi masyarakat Provinsi Jawa Timur tetap melakukan kegiatan bekerja, dan mencari pekerjaan. Terutama pada sektor *agriculture* yang menjadi prioritas andalan masyarakat Jawa Timur yang tidak memerlukan modal investasi terlalu banyak.

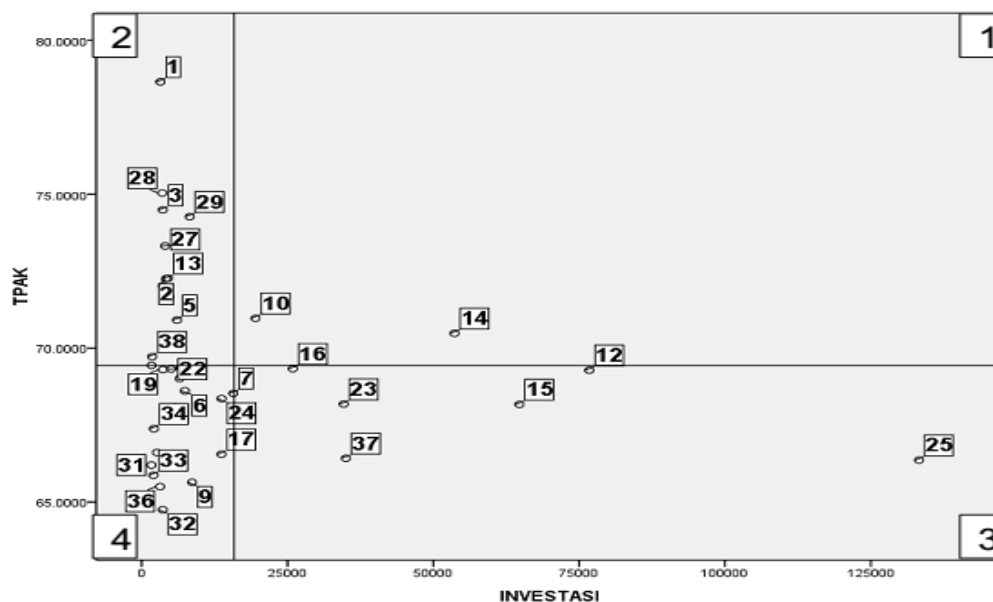
Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak investasi juga tidak terlalu berpengaruh oleh penyerapan tenaga kerja itu sendiri, tergantung pada kategori orientasi investasi. Industri padat karya atau industri padat modal inilah yang juga bisa berkaitan dengan preferensi masing-masing investor tentang kondisi iklim ekonomi yang terjadi sebagai bahan pertimbangan. Pada kondisi padat karya lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang bersifat untuk mengkreasikan pengembangan diri melalui penyerapan tenaga kerja diharapkan akan timbul suatu jumlah produktifitas yang bertahap nantinya.

Dalam padat modal jelas menginginkan produktifitas yang bergerak cepat, efisiensi biaya pada faktor input, pengendalian teknologi tinggi dan termutakhirkan. Menjadikan kualifikasi tenaga kerja yang begitu tinggi yang akan berdampak penyerapan tenaga kerja yang cenderung sedikit, karena pemanfaatan teknologi yang tinggi menuntut keahlian dan spesialisasi bagi tenaga kerja yang lain dalam mengoperasikan sebuah alat teknologi tersebut. Perlu kita mengkorelasikan kondisi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan kondisi investasi serta *impact* dalam tingkat partisipasi angkatan kerja yang bisa dikategorikan daerah padat karya atau padat modal, maka akan dapat disimpulkan pengaruh investasi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

Pada gambar 6 merupakan gambar Diagram *Kartesi* yang dapat memberi estimasi dan mengidentifikasi pengaruh investasi terhadap TPAK. Daerah kuadran merupakan salah satu kategori daerah yang mempunyai intensitas padat karya atau padat modal, atau terdapat padat modal dan padat karya. Daerah yang ditunjukkan pada kuadran satu merupakan daerah yang memiliki tingkat padat modal dan padat karya yang begitu tinggi diatas rata-rata pada daerah Provinsi Jawa Timur serta. Daerah pada kuadran dua, merupakan daerah yang memiliki tingkat padat karya diatas rata-rata yang dominan dibanding dengan padat modal, lalu pada kuadran tiga, daerah yang memiliki tingkat padat modal diatas rata-rata namun tingkat padat karya yang dibawah rata-rata. Pada kuadran empat merupakan daerah dengan intensitas padat karya dan padat modal yang minim dan cenderung dibawah rata-rata dari beberapa daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Untuk kategori pertama karakteristik daerah yang memiliki pencapaian maksimalisasi padat modal dan padat karya adalah terletak pada di dua daerah yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Pasuruan. Otomatis pada dua daerah tersebut yang masuk dalam investasi berpengaruh pada TPAK dan tinggi dalam penyerapan tenaga kerja, hal ini tentunya akan berimbas penyerapan tenaga kerja yang signifikan dan relatif banyak sehingga akan di produksi barang yang bersifat padat karya dan dalam segi kuantitas barang dapat dicapai melalui target.

Gambar 5 : **Gambar Diagram Kartesius Pengaruh Investasi Terhadap TPAK Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2014**



1	Kab. Pacitan	11	Kab. Bondowoso	21	Kab. Ngawi	31	Kota Blitar
2	Kab Ponorogo	12	Kab. Situbondo	22	Kab. Bojonegoro	32	Kota Malang
3	Kab. Trenggalek	13	Kab. Probolinggo	23	Kab. Tuban	33	Kota Probolinggo
4	Kab. Tulungagung	14	Kab. Pasuruan	24	Kab. Lamongan	34	Kota Pasuruan
5	Kab. Blitar	15	Kab. Sidoarjo	25	Kab. Gresik	35	Kota Mojokerto
6	Kab. Kediri	16	Kab. Mojokerto	26	Kab. Bangkalan	36	Kota Madiun
7	Kab. Malang	17	Kab. Jombang	27	Kab. Sampang	37	Kota Surabaya
8	Kab. Lumajang	18	Kab. Nganjuk	28	Kab. Pamekasan	38	Kota Batu
9	Kab. Jember	19	Kab. Madiun	29	Kab. Sumenep		
10	Kab. Banyuwangi	20	Kab. Magetan	30	Kota Kediri		

Sumber : BPS Jatim dan Kementerian Keuangan RI, 2010-2014 (data diolah)

Pada kuadran yang kedua ialah daerah yang memiliki ciri daerah yang memiliki tingkat TPAK yang tinggi (diatas rata-rata jumlah TPAK sebesar 69,44%), hal ini menandakan bahwa mayoritas masyarakat bergerak pada ekonomi padat karya. Pada daerah padat karya memang pertumbuhan ekonomi bertumpu pada sektor industri kecil dan menengah serta sektor informal seperti *agriculture* yang jelas banyak sekali penyerapan tenaga kerja dengan peralatan dan input produksi yang sangat sederhana dengan output produksi yang terbatas. Daerah yang termasuk dalam dalam kategori padat karya di tujukan oleh gambar pada kuadran kedua.

Pada daerah di kuadran ketiga merupakan daerah yang tingkat investasi diatas rata-rata (dengan rata-rata investasi sebesar 15 trilyun), dengan tingkat TPAK dibawah rata-rata sebesar 69,44%. Dikatakan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang padat modal, pilihan terhadap padat modal biasanya dilandaskan pada keinginan untuk mencapai tingkat produksi yang optimum dengan biaya produksi per unit yang rendah, akhirnya harga jual juga begitu rendah. Penggunaan alat teknologi yang tinggi yang menjadi andalan bagi perusahaan padat modal yang akan cenderung dalam berproduktifitas tetap stabil dan tinggi, sedangkan kualitas produk dapat dipertanggungjawabkan. Keuntungan yang lain dalam penyerapan tenaga kerja juga harus memenuhi kualifikasi yang tinggi, dalam mengoperasikan teknologi dan cenderung juga terhindar dari masalah-masalah perburuhan yang amat peka tentang upah yang semakin lama semakin meningkat. Pada daerah yang dikuadran 4 memiliki tingkat TPAK dan investasi yang dibawah rata-rata yang artinya masih mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan kegiatan ekonomi dengan intensif yang bisa dijadikan ciri khas pada daerah masing-masing.

Dengan melihat keadaan pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur mengenai perbedaan orientasi faktor produksi dan sehingga berpengaruh pada penyaluran investasi yang berpengaruh pada intensitas jumlah angkatan kerja yang berpartisipasi pada sektor produksi padat karya dan padat modal, maka tidak berpengaruhnya investasi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Pada Teori pertumbuhan tidak seimbang yang dikemukakan C.P. Kindleberge, H.W. Singer, dan A. Hirschman Teori pertumbuhan tidak seimbang

yang menyatakan bahwa tidak ada negara berkembang yang memiliki modal dan sumber daya pembangunan lain dalam jumlah besar untuk melakukan investasi pada semua sektor, oleh karena itu investasi seharusnya dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang terpilih agar hasilnya cepat berkembang, dan hasil tersebut dapat digunakan untuk membangun sektor-sektor lain. Dengan demikian perekonomian secara berangsur akan tumbuh dan berkembang dari tidak seimbang menuju ke arah pertumbuhan yang seimbang.

Pendukung strategi pertumbuhan tidak seimbang lebih menyukai investasi sektor terpilih dari pada investasi secara serentak pada semua sektor ekonomi. Investasi pada sektor terpilih menghasilkan peluang investasi baru. Hal ini dapat dicapai dengan cara membuat ketidakseimbangan ekonomi dengan sengaja. Meskipun berbeda antara pertumbuhan seimbang maupun tidak seimbang terdapat dua komponen masalah yang sama yaitu, berhubungan dengan peranan negara serta peranan keterbatasan penawaran modal. Diperlukan peranan negara dan menyiapkan tersedianya modal untuk investasi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian data yang dilakukan secara statistik, dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

1. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur adalah produk domestik regional bruto, upah minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah PDRB dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010-2014. Dari data yang diperoleh dari hasil Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur terlihat bahwa kesesuaian dengan pendapat yang sejalan pada keterkaitan partisipasi angkatan kerja. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006) didalam Wicaksono (2014), pertumbuhan penduduk dengan disertai dengan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran domestiknya juga lebih besar. .Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut.
3. Upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Upah minimum yang cenderung meningkat setiap tahun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang semakin kecil juga mempunyai 2 pandangan pada penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) merupakan usia produktif dalam bekerja, akan tetapi ada pengaruh negatif oleh tingkat upah terhadap angkatan kerja disebabkan oleh beberapa indikator diantaranya yaitu berkurangnya jumlah angkatan kerja seiring dengan peningkatan upah. Sisi permintaan tenaga kerja bagi perusahaan, pemberian upah yang semakin tinggi dapat lebih mengintensifkan produktivitas perorangan karyawannya, maka tidak diperlukan lagi penambahan karyawan. Akhirnya tidak adanya peningkatan jumlah angkatan kerja pada waktu tersebut seiring berkembangnya kenaikan upah yang signifikan. pakar teori ekonomi klasik menyatakan bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar samapai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah nilai riil menjadi turun. Upah tersebut akan hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan (*stationary state*).
4. Tidak ada pengaruh antara investasi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010-2014. Hal ini dengan melihat perilaku dari 38 Kabupaten dan Kota Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak investasi juga tidak terlalu berpengaruh oleh penyerapan tenaga kerja itu sendiri, tergantung pada kategori orientasi investasi. Industri padat karya atau industri padat modal inilah yang juga bisa berkaitan dengan preferensi masing-masing investor tentang kondisi iklim ekonomi yang terjadi sebagai bahan pertimbangan. Pada kondisi padat karya lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang bersifat untuk mengkreasikan pengembangan diri melalui penyerapan tenaga kerja diharapkan akan timbul suatu jumlah produktifitas yang bertahap nantinya. Dalam padat modal jelas menginginkan produktifitas yang bergerak cepat, efisiensi biaya pada faktor input, pengendalian teknologi tinggi dan termutakhirkan. Menjadikan kualifikasi tenaga kerja yang begitu tinggi yang akan berdampak

penyerapan tenaga kerja yang cenderung sedikit, karena pemanfaatan teknologi yang tinggi menuntut keahlian dan spesialisasi bagi tenaga kerja yang lain dalam mengoperasikan sebuah alat teknologi tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka perlunya saran sebagai masukan untuk ke arah yang lebih baik yaitu sebagai berikut:

1. Pada kenyataannya dalam jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah angka yang terbilang cukup tinggi, akan tetapi melihat kualitas dan produktifitas dari para angkatan kerja masih cukup terbilang rendah. Dengan berbagai faktor jumlah kelompok usia kerja pada tahun 2014 Provinsi Jawa Timur di dominasi pada kelompok 45 – 59 atau yang dikenal dengan kategori Pra Lanjut Usia (Lansia) dengan jumlah 130 ribu orang serta pada kelompok lansia (60 tahun ke atas) mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebanyak 184 ribu dibanding tahun 2013 tahun yang lalu. Tingginya jumlah penduduk lansia menunjukkan bahwa struktur penduduk Jawa Timur sudah mulai beranjak menuju penduduk tua. Kondisi seperti ini dapat menjadi sebuah dilema, di mana pada satu sisi dapat menjadi potensi dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang berpengalaman yang masih kerja jika masih aktif di pasar kerja, namun di satu sisi dapat menjadi beban yang ditanggung oleh mereka yang masih produktif bekerja jika para lansia sudah tidak lagi bekerja. Dengan dihadapkan oleh tantangan ini maka perlunya pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan cara sebagai berikut :
 - a. Untuk lebih meningkatkan kualitas tingkat partisipasi angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi di berbagai macam sektor maka diperlukan penyuluhan pentingnya pendidikan wajib belajar, melakukan pelatihan, spesialisasi, pemberdayaan pada masing-masing daerah dan juga diperlukan pengenalan pemutakhiran teknologi dalam berbagai sektor ekonomi. Sehingga kualitas dan kuantitas para tenaga kerja dapat bersaing dan dapat menerima pembaharuan maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat terus mendorong ketersedianya lapangan kerja dan di sisi lain diiringi peningkatan PDRB yang signifikan.
 - b. Pada sektor agraris yang banyak di dominasi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur maka perlunya pembinaan kelompok tani baik Pemda maupun Pemprov dengan membuat wadah lembaga dalam usaha tani untuk menghindari sistem *ijon* yang jelas merugikan para petani yang terkendala masalah biaya dan untuk mensejahterakan petani beserta keluarganya.
2. Standar penetapan upah minimum Kota/Kabupaten Provinsi perlu dilakukan secara bijaksana dan disarankan perlu dengan pengkajian yang akurat dan tidak terbawa oleh isu atau tren yang belakangan ini tentang munculnya tuntutan agar segera dinaikkan upah minimum. Untuk itu saran dan masukkan antara lain :
 - a. Perlu adanya keseimbangan dan kemaslahatan bersama antara pengusaha dan para tenaga kerja dengan berkaca pada keadaan ekonomi daerah masing-masing, agar tidak menjadi kekuatan upah yang nantinya akan memperbesar tingkat pengangguran terbuka.
 - b. Perlu kita cermati kenaikan upah minimum pada dasarnya terjadi pada syarat kehidupan layak pada suatu daerah yang berpedoman pada indeks harga konsumen daerah. Secara umum asal muasal dari semuanya itu dari inflasi itu sendiri serta inflasi merupakan proses berlebihnya permintaan dibandingkan dengan penawaran pada suatu daerah. Pada umumnya ini terjadi pada daerah perkotaan yang mayoritas memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, sehingga permintaan akan barang juga terlampaui tinggi (terutama barang pokok), maka harga barang melonjak naik (*demand pull inflation*). Maka hal ini perlu adanya penanggulangan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam mengatasi urbanisasi.
3. Dengan melihat keadaan pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur mengenai perbedaan orientasi faktor produksi sehingga berpengaruh pada penyaluran investasi yang berpengaruh pada intensitas jumlah angkatan kerja yang berpartisipasi pada sektor produksi padat karya dan padat modal, maka tidak berpengaruhnya investasi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Pada Teori pertumbuhan tidak seimbang yang dikemukakan C.P. Kindleberger, H.W. Singer, dan A. Hirschman yang menyatakan bahwa tidak ada negara berkembang yang memiliki modal dan sumber daya pembangunan lain dalam jumlah besar untuk melakukan investasi pada semua sektor, oleh karena itu investasi seharusnya dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang terpilih agar hasilnya cepat berkembang, dan hasil tersebut dapat digunakan untuk membangun sektor-sektor lain. Dengan demikian perekonomian secara berangsur akan tumbuh dan berkembang dari tidak seimbang menuju ke arah pertumbuhan yang seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69, 72, 78, 81, 93, 95 Tahun 2009 – 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
- _____. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementrian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019. 2015. Jakarta
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bellante, Don & Mark Johnson. 1990. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Boediono. 1982. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Ekonomi Makro*. Yogyakarta : BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada.
- BPS Jawa Timur, 2015. *Jawa Timur Dalam Angka 2010 – 2014 Seri Katalog*. Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur
- BPS Jawa Timur, 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota Menurut Lapangan Usaha 2010 – 2014 Seri Katalog*. Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur
- BPS Jawa Timur. 2015. *Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Timur 2010-2014 Seri Katalog*. Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur
- BPS Jawa Timur. 2015. *Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Timur 2010-2014 Seri Katalog*. Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur
- BPS RI. 2016. *Perkiraan Penduduk Berbagai Negara 2000-2014*. www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/960. Diakses pada tanggal 4 Maret 2016
- BPS RI. 2016. *Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berbagai Negara 2000-2014*. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1243>. Diakses pada tanggal 4 maret 2016
- BPS RI. 2015. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum Regional, laju PDRB Menurut Provinsi Tahun 2002-2014 (%)*. www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2015
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. 2016. *Realisasi APBD, APBD dan Neraca Pemerintah Daerah*. www.djpk.depkeu.go.id . Diakses pada tanggal 19 April 2016
- Hasibuan, Sayuti. 1996. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Irawan, dan M. Suparmoko. 2012. *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Jakarta : Erlangga.
- Mulyadi, S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sekaran, Uma. 2007. *Research Methods for Business, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 1 Edisi 4*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 2 Edisi 4*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Sukirno, Sadono. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wicaksono, Muhammad Nur. 2014. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja, dan Belanja Modal Daerah terhadap Peningkatan PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang